

PENINGKATAN ALOKASI ANGGARAN PEN TAHUN 2021 DALAM MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI

19

Edmira Rivani

Abstrak

Pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19 telah berdampak pada berhentinya aktivitas ekonomi dan turunnya kinerja ekonomi. Pemerintah menyiapkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Tulisan ini mengkaji tentang peningkatan alokasi anggaran, tantangan, dan strategi program PEN Tahun 2021 dalam mempercepat pemulihan ekonomi. Pemerintah menaikkan pagu anggaran Program PEN dua kali lipat dibandingkan yang ditetapkan dalam UU APBN 2021, mencapai Rp699,4 triliun. Anggaran PEN 2021 fokus untuk lima bidang, yakni kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, serta dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Pemulihan ekonomi yang terpukul pandemi Covid-19 akan menghadapi tantangan yang berat. Salah satu penyebabnya adalah kinerja penyaluran stimulus PEN pada tahun 2020 yang belum efektif, sehingga tahun 2021 implementasi dan efektivitas program pemulihan menjadi persoalan yang harus diatasi pemerintah. Salah satunya adalah menyelesaikan permasalahan data penerima bantuan. Dukungan dan pengawasan DPR RI khususnya komisi terkait sangat diperlukan dalam mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 ini.

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang telah berlangsung selama setahun, menimbulkan tekanan dan efek di semua sektor, baik secara global maupun domestik. Namun, tahun 2021 diprediksi akan mengalami perbaikan dengan akselerasi vaksinasi yang dilakukan hampir di semua negara, termasuk Indonesia. Di tengah sentimen positif vaksin, outlook PDB global dihadapkan pada risiko ketidakpastian berupa

gelombang baru dan penemuan varian baru virus penyebab Covid-19.

Di sisi domestik, tekanan ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang paling moderat. Dengan defisit yang relatif rendah, Indonesia tetap mampu menjadi salah satu negara dengan daya tahan pertumbuhan ekonomi cukup baik di antara kelompok G20 dan ASEAN (kemenkeu.go.id, 26 Februari 2021). Berlanjutnya fase pemulihan perekonomian Indonesia tercermin



dari tingkat pertumbuhan PDB Triwulan IV-2020 sebesar -2,19% (*year on year/YoY*), naik dari dua triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi -5,32% pada Triwulan II dan -3,49% pada Triwulan III. Pemulihan ekonomi domestik diharapkan terus berlanjut, tahun 2021 diproyeksikan tumbuh 5,0%, dengan kisaran 4,5-5,3% (kemenkeu.go.id, 26 Februari 2021).

Mengawali tahun 2021, ekonomi Indonesia terus bergerak maju, meskipun beberapa indikator bergerak bervariasi. Pemerintah terus berupaya mengendalikan pandemi dengan menyeimbangkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan aktivitas ekonomi agar kesehatan masyarakat terjaga dan ekonomi tetap bergerak. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Alokasi anggaran PEN 2021 melonjak mendekati 21% dari realisasi anggaran tahun 2020 karena merupakan motor paling penting dalam perekonomian saat ini. Menteri Keuangan menjelaskan bahwa peningkatan anggaran PEN tersebut dimaksudkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, menjadi daya dorong yang efektif untuk pemulihan, terutama *front loading* pada Kuartal I-2021. Selama pandemi masyarakat sangat tergantung pada APBN sehingga anggaran PEN 2021 dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Tulisan ini mengkaji tentang peningkatan alokasi anggaran Program PEN, tantangan Program PEN berdasarkan evaluasi tahun 2020, serta strategi agar Program PEN dapat mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia.

Peningkatan Alokasi Anggaran Program PEN Tahun 2021

Pemerintah untuk kelima kalinya menaikkan pagu anggaran Program PEN hanya dalam dua bulan sepanjang 2021. Anggaran pemulihan tersebut naik hampir dua kali lipat dibandingkan yang ditetapkan dalam UU APBN Tahun Anggaran 2021. Semula, anggaran pemulihan sebesar Rp372,3 triliun, dan kini menjadi Rp699,4 triliun. Anggaran PEN 2021 fokus untuk lima bidang, yakni kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, insentif usaha, serta dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Bidang pertama, yaitu kesehatan memiliki alokasi anggaran Rp176,3 triliun yang meliputi program vaksinasi Rp58,18 triliun, diagnostik (*testing* dan *tracing*) Rp9,91 triliun, *therapeutic* Rp61,94 triliun, insentif pajak kesehatan Rp18,61 triliun, dan penanganan lainnya Rp27,67 triliun (Media Indonesia, 24 Februari 2021).

Bidang kedua adalah perlindungan sosial Rp157,41 triliun, yang antara lain meliputi PKH bagi 10 juta KPM Rp28,71 triliun dan kartu sembako Rp45,12 triliun. Kemudian, bidang ketiga adalah program prioritas sebesar Rp125,06 triliun meliputi padat karya K/L Rp27,33 triliun, ketahanan pangan Rp47,1 triliun, kawasan industri Rp11,33 triliun, pinjaman daerah Rp10 triliun, *Information and Communication Technology* (ICT) Rp16,65 triliun, pariwisata Rp8,66 triliun, dan prioritas lainnya Rp4,11 triliun. Fokus PEN bidang keempat adalah dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp186,81 triliun. Sedangkan bidang kelima adalah insentif usaha sebesar Rp53,86 triliun (Republika, 24 Februari 2021). Peningkatan anggaran PEN diharapkan dapat

mendorong percepatan pemulihan ekonomi sekaligus menjaga ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Tantangan Program PEN

Pemulihan ekonomi tahun 2021 diproyeksikan menghadapi tantangan yang berat. Salah satu penyebabnya adalah kinerja penyaluran dana stimulus PEN pada tahun 2020 yang belum efektif. Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk program PEN tahun 2020. Namun, sampai penghujung 2020 belum seluruhnya terealisasi. Realisasi Anggaran PEN hingga 31 Desember 2020 baru mencapai 83,4% dari total anggaran atau senilai Rp579,78 triliun (Media Indonesia, 25 Februari 2021).

Penyaluran program dengan persentase paling tinggi adalah perlindungan sosial dan dukungan UMKM. Namun, kedua program tersebut belum efektif. Inefektivitas program perlindungan sosial bisa tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS). Komponen ini hanya tumbuh

tipis dari -5,52% secara tahunan (YoY) pada kuartal kedua 2020, menjadi -4,04% (YoY) pada kuartal selanjutnya. Padahal, pemerintah telah mencatat 67,54 juta keluarga telah menerima manfaat bansos dalam bentuk sembako dan bantuan langsung tunai per 23 Desember 2020 (katadata.co.id, 1 Maret 2021).

Berdasarkan data ketenagakerjaan BPS, angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2020 naik 1,74% (YoY) menjadi 138,2 juta. Namun penduduk yang bekerja menurun 0,24% menjadi 128,45 juta. Angkatan kerja yang menganggur naik signifikan 37,61% menjadi 9,77 juta dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 7,07%. Dampak dari hal ini adalah peningkatan penduduk miskin baru dari kelompok rentan. Simulasi Bank Dunia menunjukkan, tanpa respons bansos sebanyak 8,5 juta, penduduk Indonesia dapat terjerumus ke jurang kemiskinan akibat krisis Covid-19.

Untuk dukungan UMKM, inefektivitas tercermin dari realisasi dukungan dalam bentuk insentif usaha yang hanya terserap 45,4% dari total pagu Rp120,61 triliun sampai akhir 2020. Dampaknya, seperti dalam laporan Bank Dunia,

Tabel 1. Perbandingan Beberapa Negara terhadap Kasus Covid-19, Stimulus Covid-19, dan Laju Pertumbuhan PDB Tahunan

Negara	Jumlah Kasus Covid-19	Stimulus terhadap PDB (%)	PDB Q1-2020	PDB Q2-2020	Perubahan PDB
AS	19977704	12,1	-31,4	33,4	64,8
India	10245326	10	-23,9	-7,5	16,4
Perancis	2574041	14,6	-13,8	18,7	32,5
Inggris	2382865	14,5	-18,8	16	34,8
Turki	2178580	12,8	-10,8	15,6	26,4
Jerman	1691707	33	-9,8	8,5	18,3
Indonesia	735124	4,2	-5,32	-3,49	1,83
Filipina	472532	3,1	-16,9	-11,5	5,4

Sumber: IMF dan Worldometer, Desember 2020.

laju pemulihan tak merata di seluruh sektor usaha pada kuartal ketiga 2020. Bahkan, pertumbuhan beberapa sektor justru menurun dibandingkan kuartal kedua 2020. Sektor-sektor dengan intensitas kontak tinggi antarmanusia seperti transportasi, perhotelan, perdagangan, konstruksi, dan manufaktur mengalami dampak yang sangat keras dan baru sebagian pulih. Sementara sektor yang menurun dari kuartal sebelumnya adalah pertanian, pertambangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, dan *real estate*.

Anggaran PEN pada 2020 hanya 4,2% dari total PDB. Jauh lebih kecil dari India dan Turki yang masing-masing menganggarkan dana stimulus Covid-19 sebesar 10% dan 12,8% dari total PDB. Dengan rasio stimulus yang lebih besar tersebut, India dan Turki pun mampu membalikkan perekonomiannya lebih cepat daripada Indonesia (Tabel 1). Ekonomi India meningkat 16,4% dari tumbuh -23,9% pada Kuartal II 2020 menjadi -7,5% pada triwulan selanjutnya. Lalu, ekonomi Turki meningkat 26,4% dari tumbuh -10,8% pada Kuartal II 2020 menjadi 15,6% pada kuartal selanjutnya. Sedangkan ekonomi Indonesia hanya meningkat 1,83% dari tumbuh -5,32% pada Kuartal II 2020 menjadi -3,49% pada kuartal III 2020 (katadata.co.id, 1 Maret 2021).

Dengan penguatan PEN dan upaya percepatan vaksinasi tahun 2021, kondisi ekonomi ke depan diharapkan membaik. Sinergi dan peran aktif semua pihak juga dibutuhkan agar Indonesia dapat segera pulih dari pandemi ini.

Strategi Program PEN

Direktur Eksekutif *Institute for Development of Economics and*

Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan dengan besaran anggaran yang meningkat pada tahun 2021, implementasi dan efektivitas program pemulihan menjadi persoalan yang harus diatasi pemerintah, sebab anggaran besar belum tentu akan meningkatkan konsumsi, selama situasi pandemi masih belum mereda. Apalagi fokus pemerintah kali ini ditujukan untuk pemulihan ekonomi pada sektor usaha seperti UMKM dan korporasi.

Menurut Tauhid, penyaluran program perlindungan sosial tetap harus menjadi prioritas karena memiliki dampak paling besar terhadap perekonomian dan mampu menjadi bantalan bagi masyarakat yang paling terdampak. Mempertahankan konsumsi kelompok ekonomi terbawah jauh lebih penting untuk menjaga *demand*. Tidak menjadi masalah jika jumlah penerimanya lebih kecil, misalnya 20% penduduk miskin terbawah, tetapi jumlah bantuannya ditingkatkan 2 kali lipat. Diharapkan tidak mengulangi strategi tahun lalu yang memberikan bansos sampai 50% dengan jumlah yang kecil, tetapi angka kemiskinan tetap bertambah (lokadata.id, 28 Februari 2021).

Belajar dari penyaluran tahun lalu, pemerintah harus terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan data penerima bantuan, di mana Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak diperbarui oleh pemerintah daerah, padahal DTKS ini menjadi kunci agar penyaluran dana PEN perlindungan sosial khususnya bansos bisa tersalurkan dengan baik. Selain agar tepat sasaran, perbaikan ini juga dapat mendorong realisasi penyaluran bantuan akan lebih cepat dan efektif.

Pemerintah memprioritaskan sektor usaha UMKM, sebab mereka

cenderung lebih rentan daripada sektor usaha lainnya. Di sisi lain, untuk korporasi, belum tentu akan banyak menggunakan insentif pajak, selama *demand side*, yakni konsumsi rumah tangga masih lemah. Sasaran dan mekanisme program pemulihan ekonomi tersebut harus memiliki efek pengganda paling besar ke konsumsi sehingga peningkatan anggaran pemulihan di sektor-sektor tersebut dapat membuahkan hasil yang maksimal.

Selain itu, Ekonom *Center of Reform on Economics* (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet berpendapat, peningkatan dana PEN itu harus diiringi dengan upaya perbaikan penyaluran stimulus tersebut. Berdasarkan pengalaman tahun 2020, ada pos anggaran PEN yang tidak optimal, seperti anggaran kesehatan. Dana PEN untuk anggaran kesehatan pada tahun lalu hanya terealisasi sebesar 63,8% atau Rp63,51 triliun dari total pagu Rp99,5 triliun. Padahal dalam konteks penanganan pandemi justru anggaran kesehatan inilah yang penting sebagai upaya menanggulangi pandemi Covid-19 yang bersifat *unprecedented* atau tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun untuk tahun ini pemerintah diminta sudah mempunyai rancangan kebijakan yang lebih matang (Media Indonesia, 24 Februari 2021). Khususnya, dalam mempertahankan konsumsi kelompok ekonomi terbawah, memberikan prioritas penyaluran dana stimulus pada sektor yang penting dalam menghadapi pandemi ini, serta menyelesaikan permasalahan teknis seperti memperbaiki data penerima bantuan.

Penutup

Ekonomi bergerak karena

ada 2 kekuatan, yakni permintaan (konsumsi) dan penawaran (produksi). Namun, pandemi Covid-19 cukup memukul keras ekonomi Indonesia pada 2 sisi tersebut. Karena itu, pemerintah menyiapkan program PEN untuk memulihkan ekonomi Indonesia baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Pemerintah telah menaikkan pagu anggaran program PEN hanya dalam dua bulan sepanjang 2021, mencapai Rp699,4 triliun. Namun, penyaluran dana stimulus PEN pada tahun 2020 belum efektif, tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menjadi penyumbang terbesar PDB. Komponen ini hanya tumbuh tipis dari -5,52% secara tahunan (YoY) pada kuartal kedua 2020, menjadi -4,04% (YoY) pada kuartal selanjutnya. Selain itu, angkatan kerja yang menganggur naik signifikan 37,61% menjadi 9,77 juta dengan TPT 7,07%. Dampak dari hal ini adalah peningkatan penduduk miskin baru dari kelompok rentan.

Pemerintah perlu memperhatikan implementasi dan efektivitas program PEN, seperti mempertahankan konsumsi kelompok ekonomi terbawah, memberikan prioritas penyaluran dana stimulus pada sektor yang penting dalam menghadapi pandemi ini, serta menyelesaikan permasalahan data penerima bantuan. Dengan penguatan PEN dan upaya percepatan vaksinasi, kondisi ekonomi ke depan diharapkan membaik. Sinergi dan peran aktif semua pihak juga dibutuhkan agar Indonesia dapat segera pulih dari pandemi ini. Dukungan dan pengawasan DPR RI, khususnya komisi terkait juga diperlukan dalam percepatan penyerapan anggaran PEN yang lebih efektif dan efisien.

Referensi

“Anggaran Pemulihan Naik Terus, Perlu Lebih cepat dan Tepat Sasaran”, 28 Februari 2021, <https://lokadata.id/artikel/anggaran-pemulihan-naik-terus-perlu-lebih-cepat-dan-tepat-sasaran>, diakses 28 Februari 2021.

“Anggaran PEN Dekati Rp700 triliun”, Media Indonesia, 24 Februari 2021, hal.10.

“Anggaran PEN Ditambah Jadi Rp699 triliun”, Republika, 24 Februari 2021, hal.7.

“Batu Sandungan Pemulihan Ekonomi

2021 dari Program PEN”, 5 Januari 2021, <https://katadata.co.id/0/analisisdata/5ff300ae4f37b/batu-sandungan-pemulihan-ekonomi-2021-dari-program-pen>, diakses 1 Maret 2021.

Kementerian Keuangan, 23 Februari 2021, “Pemerintah Jaga Sentimen Positif Pemulihan Ekonomi, Perkuat Implementasi dan Sinergi Kebijakan Ekonomi”, Siaran Pers SP-08/KLI/2021.

“Perbaiki Penyaluran Anggaran PEN”, Media Indonesia, 25 Februari 2021, hal. 11.



Edmira Rivani
edmira.rivani@dpr.go.id.

Edmira Rivani, S.Si, M.Stat. menyelesaikan studi S1 pada jurusan Statistika – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran pada tahun 2008, dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada Jurusan Statistika Terapan – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran tahun 2009. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan kepakaran kebijakan ekonomi. Beberapa karya tulis ilmiah tentang ekonomi dan kebijakan publik telah dihasilkan seperti: Perubahan Struktur Ekonomi Tenaga Kerja dan Analisis Multidimensional Scaling (MDS) dalam Mengelompokkan Penyerapan Tenaga Kerja di Berbagai Provinsi (2014), Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia dalam Menghadapi ASEAN China Free Trade Area (2015), Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Berkelanjutan (2015)

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.